

SENAT R



MAJALAH DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

EDISI : 16-30 APRIL 2024

■ **Varia Senat**
RPJPN 2025-2045
Harus Mampu Tumbuhkan
Ekonomi di Luar Jawa

■ **Sekretariat Jenderal**
Jelang Idulfitri 2024
KORPRI Setjen DPD RI Bagikan
Bingkisan

■ **Kuliner**
Empat Kuliner
Paling Dinanti saat Lebaran
Four Most Anticipated Culinary
Delights During Eid

MANFAATKAN
MOMEN LEBARAN
USAI PEMILU 2024

SCAN
ME

Akses
MAJALAH SENATOR
Versi Digital



Dari Daerah Untuk Indonesia

ISSN 2978 - 3118

ISSN 2987-3118



9 772987 311004

Masyarakat Adat di Kalimantan
Jangan Hanya Jadi Penonton IKN



SENAT UTAMA

4



- Manfaatkan Momen Lebaran Usai Pemilu 2024
- Momen Konsolidasi Antaranak Bangsa
- Momentum Rekonsiliasi Pasca Pilpres 2024
- Idulfitri Perkuat Kohesi Sosial

NUSANTARA

9

- Masyarakat Adat di Kalimantan
Jangan Hanya Jadi Penonton IKN
- Pembangunan Kaltim Harus Sinkron dengan IKN
- Banyak Karya Seniman di Bali Belum Dilindungi
Pilkades Langsung Berbiaya Mahal
- Senator Apresiasi Kemenag, Lulusan Pesantren Bisa
Daftar CPNS

VARIA SENAT

14

- RPJPN 2025-2045 Harus Mampu Tumbuhkan Ekonomi
di Luar Jawa
- Catatan Komite I DPD RI atas Pelaksanaan Pemilu 2024
- Kenaikan Harga Pangan Bisa Naikkan Angka
Kemiskinan
- BULD DPD RI: Rekonstruksi Legislasi Tata Kelola
Ketahanan Pangan
- Petugas Haji Jangan Sekedar Jalan-jalan
- Penting, Zonasi Usaha Dorong Pemberdayaan UMKM di
Daerah

SEKRETARIAT JENDERAL

25

- Jelang Idulfitri 2024
KORPRI Setjen DPD RI Bagikan Bingkisan
- SKM Layanan Publik DPD RI Alami Peningkatan
Signifikan

GALERI

27



KAJIAN DAERAH

28

- Meninjau Kembali Manfaat Pramuka:
Dilema Penghapusan Ekstrakurikuler Wajib
Oleh: Moh. Yusuf, SH

KULINER

30

- Empat Kuliner Paling Dinanti saat Lebaran
*Four Most Anticipated Culinary Delights During
Lebaran*





Pemilu 2024 dan Idulfitri 1445 H

Hari Raya Idulfitri 1445 H tahun ini menjadi istimewa karena bertepatan dengan rangkaian pemilu 2024 di Indonesia, dimana masyarakat sempat terbagi akibat perbedaan pilihan politik. Momentum lebaran diharapkan menjadi kesempatan untuk konsolidasi nasional, menyatukan kembali seluruh komponen bangsa yang berbeda pilihan dalam pemilihan Presiden dan anggota legislatif.

Selama periode pemilihan, dukungan terhadap tiga pasangan calon presiden—Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD—telah menciptakan polarisasi. Namun, Idulfitri menawarkan kesempatan berharga untuk melebur perbedaan, mulai dari pelaksanaan salat Id bersama, hingga pertemuan antara masyarakat dengan pemimpin nasional.

Karakter bangsa Indonesia yang menghargai persaudaraan dan perbedaan diharapkan mengatasi perselisihan yang diakibatkan oleh pemilu. Hari Raya ini harus menjadi titik balik untuk mengurangi ketegangan dan memulihkan kepercayaan antarsesama, terutama setelah masa kampanye yang intens.

Mari kita gunakan Idulfitri ini untuk benar-benar 'move on' dari konflik pemilu. Dengan semangat saling meminta dan memberi maaf, kita harap semua pihak bisa kembali berangkuhan, menjaga persatuan dan keharmonisan nasional. Ini adalah waktu yang tepat untuk mengesampingkan perbedaan dan membangun kembali Indonesia yang solidaritas dan toleransinya kuat. **(* /Pemred) P**

Election 2024 and Eid al-Fitr 1445 H

This year's Eid al-Fitr 1445 H is special as it coincides with the 2024 election series in Indonesia, where the community was once divided by differing political choices. The festive moment of Eid is expected to serve as an opportunity for national consolidation, reuniting all elements of the nation that had different preferences in the presidential and legislative elections.

During the election period, support for the three presidential candidate pairs—Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, and Ganjar Pranowo-Mahfud MD—created polarization. However, Eid al-Fitr offers a valuable opportunity to melt away these differences, starting from performing the Eid prayer together to meeting between the community and national leaders.

The character of the Indonesian nation, which values brotherhood and diversity, is expected to overcome the disputes caused by the elections. This festive day should be a turning point to reduce tensions and restore mutual trust, especially after an intense campaign period.

*Let us use this Eid al-Fitr to truly 'move on' from the electoral conflicts. With a spirit of asking for and granting forgiveness, we hope that all parties can come together again, maintaining national unity and harmony. This is the right time to set aside differences and rebuild an Indonesia known for its solidarity and tolerance. **(* /editor-in-chief)***



MANFAATKAN MOMEN LEBARAN USAI PEMILU 2024



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti beserta keluarga bersama Prabowo Subianto dan Titi Soeharto. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Momen lebaran tahun ini, yaitu Idulfitri 1445 H agak berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena suasananya saat bangsa Indonesia baru saja selesai menggelar pesta demokrasi lima tahunan, yaitu pemilihan Presiden Republik Indonesia dan anggota legislatif untuk periode lima tahun ke depan.



Foto Ilustrasi ist

Bagi Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti beserta keluarga, momen lebaran tahun ini untuk bersilaturahmi dengan Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, yang juga Presiden RI terpilih pada Pemilu 2024, Rabu (10/4/2024).

Pertemuan tersebut berlangsung pada Rabu (10/4/2024) dalam acara *open house* yang diadakan di kediaman pribadi Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

LaNyalla bersama keluarga disambut hangat oleh Prabowo Subianto yang didampingi oleh Titiek Soeharto. LaNyalla menyampaikan, “Ini merupakan momen silaturahmi sekaligus nostalgia.”

Bagi LaNyalla, hubungan dengan Prabowo Subianto

bukanlah hal yang baru. Pada tahun 2009, LaNyalla bergabung dengan Partai Gerindra dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang ditandatangani oleh Ketua Umum Suhardi dan Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani. Ia bahkan menjadi bagian dari Tim Sukses Nasional dalam Pilpres 2014 ketika Gerindra mengusung Prabowo-Hatta.

Hubungan LaNyalla dengan Partai Gerindra sempat merenggang pada tahun 2018, ketika partai tersebut tidak mengusungnya sebagai calon gubernur Jawa Timur. LaNyalla kemudian memilih maju sebagai calon anggota DPD RI dan terpilih menjadi Ketua DPD RI.

LaNyalla menegaskan bahwa ia telah melupakan kejadian masa lalu terkait pencalonannya sebagai Gubernur

Jatim dan lebih fokus pada tugas serta amanat sebagai Ketua DPD RI dalam memperjuangkan kepentingan daerah dalam konteks kebangsaan. “Tidak ada masalah. Sejak saya menjadi Ketua DPD RI, saya beberapa kali bertemu Pak Prabowo di acara kenegaraan, baik di Istana Presiden maupun di Sidang Tahunan MPR di kompleks Parlemen Senayan,” tambahnya.

Sebelum berkunjung ke kediaman Prabowo, LaNyalla bersama istrinya, serta Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan istrinya, juga telah menghadiri *open house* yang diadakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, di mana mereka bertemu dengan Prabowo dan putranya, Didit Hediprasetyo. (*)



Wakil Ketua MPR RI dari Kelompok DPD RI Fadel Muhammad dan istri bersama dalam kegiatan open house di rumah dinas. (Foto Istimewa)

Hari Raya Idulfitri 1445 H diharapkan menjadi momentum konsolidasi nasional, mengingat hari raya kali ini bertepatan dengan rangkaian Pemilu 2024. Selama periode pemilihan, perbedaan pilihan politik membagi masyarakat ke dalam berbagai kelompok, terutama di antara pendukung tiga pasangan calon presiden utama.

“Harapan kami, Idulfitri kali ini bisa menjadi titik temu untuk menyatukan kembali semua perbedaan yang ada, sehingga yang tadinya terpecah bisa bersatu kembali,” ungkap Fadel Muhammad, Wakil Ketua MPR RI dari kelompok DPD RI, saat acara *open house* di hari kedua Idulfitri 1445 H yang diselenggarakan di rumah dinas, Kemanggisan Ilir Raya, Jakarta Barat, pada

Kamis (11/4/2024).

Senator asal Gorontalo ini merasakan betapa pentingnya persatuan terasa di hari raya ini yang dimulai dari pelaksanaan salat Id, bersilaturahmi dengan Presiden dan Wakil Presiden RI, serta pertemuan dengan para tokoh nasional dan mantan pemimpin negara. Kemeriahan dan semangat persatuan ini semakin terasa saat ia mengadakan *open house*.

“Kami berharap semangat persatuan ini bisa terus dipertahankan. Kami ingin masyarakat melupakan perbedaan dukungan dalam pemilu, baik itu untuk Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, maupun Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Semua berkumpul, berpelukan, saling meminta dan memberi

maaf. Kami berharap suasana ini bisa dipertahankan untuk selama-lamanya,” ujar Fadel.

Dia juga berharap bahwa perselisihan yang muncul akibat perbedaan pilihan dalam pemilu bisa segera berakhir. Menurutnya, karakter bangsa Indonesia yang dikenal dengan kekuatan persaudaraan dan penghormatan terhadap perbedaan harus terus dipelihara.

Acara *open house* di rumah dinas Fadel Muhammad berlangsung lancar dan dihadiri oleh berbagai lapisan masyarakat yang ingin bersilaturahmi dan saling memaafkan. Beragam hidangan khas lebaran serta kuliner Timur Tengah turut disajikan, menunjukkan penghormatan Fadel Muhammad sebagai tuan rumah terhadap para tamunya. (*)

Momentum Rekonsiliasi Pasca Pilpres 2024

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie, menyatakan harapan bahwa Hari Raya Idulfitri 1445 H dapat menjadi momentum rekonsiliasi pasca-Pilpres 2024. Mengingat Ramadan dan Idulfitri kali ini bertepatan dengan tahun politik yang sibuk di mana Indonesia menggelar Pemilu 2024.

“Maka dari itu, saya mengajak semua elemen masyarakat untuk memanfaatkan Idulfitri ini sebagai waktu untuk rekonsiliasi. Marilah kita hentikan penyebaran narasi yang bernada kebencian dan permusuhan, baik di ruang publik maupun di media sosial,” ujar Jimly saat diwawancarai wartawan setelah melaksanakan salat Id di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan, pada Rabu (10/4/2024).

Jimly juga menyinggung

tentang proses sengketa hasil Pilpres 2024 yang saat ini tengah berlangsung di MK. Terdapat gugatan dari pasangan calon nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan nomor urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD terhadap kemenangan pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Beliau mengimbau semua pihak untuk mengikuti dan menghormati proses perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di MK. “MK telah mendengarkan semua argumen dari berbagai

pihak dalam sidang yang telah berlangsung. Apapun keputusan yang akan diambil oleh MK, kita semua diharapkan dapat menerima dan menghormatinya,” tambah Jimly.

Setelah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam *open house* di kediaman Presiden RI kelima tersebut di Menteng, Jakarta, pada hari yang sama, Jimly kembali menekankan harapan bahwa Hari Raya Idulfitri bisa menjadi kesempatan untuk meredakan ketegangan yang ditimbulkan oleh pemilu, khususnya pilpres.

“Mari kita *move on*. Kita perlu mengurangi ketegangan dan memulihkan kembali kepercayaan antar satu sama lain. Semua pihak, meskipun dari kubu yang berbeda, diharapkan dapat saling berangjukan usai pilpres. Semoga setelah ini kita bisa saling berpelukan, tidak ada lagi ketegangan yang berkepanjangan,” kata Jimly. (*)

Anggota DPD RI
Jimly Asshiddiqie





Idulfitri Perkuat Kohesi Sosial

Semua tradisi yang terlibat dalam perayaan Idulfitri berperan vital dalam memperkuat kohesi sosial di Indonesia. Tradisi seperti mudik, takbiran, saling memaafkan, kunjungan antarkeluarga, silaturahmi, dan berbagi, secara tidak langsung menyatukan masyarakat Indonesia.

“Idulfitri adalah kesempatan untuk mempererat kembali hubungan kita dengan keluarga dan tetangga. Perayaan Idulfitri tahun ini juga menjadi momen bagi masyarakat Indonesia untuk menghidupkan kembali tali persaudaraan, memperkuat hubungan sosial, dan meningkatkan kohesi antar semua lapisan masyarakat,” ungkap Fahira Idris, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, dalam keterangannya pada Selasa (9/4/2024).

Semangat kebersamaan yang tercermin dalam perayaan Idulfitri, khususnya dalam tradisi mudik, tidak hanya sekedar pulang kampung, tetapi juga sebagai wujud persatuan dan kehangatan antarkeluarga yang terpisah oleh jarak. Tradisi mudik menciptakan interaksi sosial yang mendalam antar generasi, budaya, dan tradisi di Indonesia.

Oleh karena itu, semangat Idulfitri harus dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperkuat fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara dengan memelihara solidaritas dan kerukunan. “Semoga momen tahun ini membawa berkah bagi Indonesia untuk terus maju dan mencapai kemenangan,” tutur Fahira.

Di lokasi berbeda, Djafar Alkatiri, anggota DPD RI dari Provinsi Sulawesi Utara, menyatakan bahwa Hari Raya Idulfitri

1445 H merupakan suatu nikmat bagi umat muslim setelah menjalankan ibadah puasa selama satu bulan.

“Idulfitri bagi umat Islam adalah perayaan kemenangan dan kembali ke fitrah. Umat Islam saling berbagi, berbuka hati. Kita saling mengunjungi dan memaafkan satu sama lain. Itulah esensi dari Hari Raya Idulfitri,” kata Djafar saat mengadakan *open house* di kediamannya, Kelurahan Maasing, Kota Manado, Sulawesi Utara, pada Rabu (10/4/2024).

Djafar berharap umat Islam tetap solid dan menjaga ukhuwah. Dia juga mengajak umat Islam untuk terus beribadah dengan baik selama sebelas bulan ke depan, serta menjadi bagian dari bangsa ini dalam membangun dan memperbaiki negara dan daerah agar menjadi lebih baik. (*)



Anggota DPD RI Fahira Idris
(Foto/dok pribadi)

Anggota DPD RI Djafar Alkatiri
(Foto/dok pribadi)

Masyarakat Adat di Kalimantan Jangan Hanya Jadi Penonton IKN

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur menimbulkan tantangan dan peluang bagi masyarakat di Kalimantan, termasuk di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Karena itu, penduduk Kalteng perlu meningkatkan kecerdasan dan daya saing untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat.

“Kita harus bersiap menghadapi pemindahan IKN. Bahkan tanpa adanya pemindahan ini, persaingan akan selalu ada dalam kehidupan, terlebih dengan keberadaan IKN di Pulau Kalimantan. Kita perlu menjadi lebih cerdas dan waspada melalui pendidikan. Harus terus belajar dan meningkatkan kemampuan diri, terutama di era yang mengharuskan kita untuk membuat lompatan besar,” ujar anggota DPD RI Agustin Teras Narang, dalam sambutannya pada Latihan Kepemimpinan Kader (LKK) Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Palangka Raya, Sabtu (6/4/2024).

Narang menekankan bahwa persaingan adalah hal yang tidak bisa dihindari. Masyarakat Kalteng tidak dapat sekadar berdiam diri dengan mengandalkan identitas sebagai masyarakat adat atau Dayak. Penting bagi masyarakat adat untuk tidak hanya menjadi penonton dalam pembangunan IKN, dan

tidak boleh terpinggirkan.

“Saya selalu mendukung masyarakat intelektual, termasuk PMKRI Cabang Palangkaraya, untuk berkolaborasi dengan masyarakat adat dan lokal. Ini penting agar mereka dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memiliki daya saing, serta ketahanan saat IKN menyebabkan migrasi penduduk yang besar-besaran ke Kalimantan,” kata Teras.

Gubernur Kalteng periode 2005-2010 dan 2010-2015 ini juga mengajak PMKRI Cabang Palangkaraya untuk memantau pembangunan IKN secara cerdas dan bijaksana, dengan memegang teguh semangat 5K: kritis, konstruktif, konstitusional, kesantunan, dan semangat kebersamaan.

Secara khusus, Teras berharap PMKRI dan gerakan mahasiswa lainnya di Kalimantan tetap fokus pada agenda pembangunan IKN. Belum lama ini, proses pengesahan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ) telah selesai, sehingga menurut Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, hanya tinggal menunggu Keputusan Presiden untuk secara resmi memindahkan IKN ke Pulau Kalimantan.

“Setelah pemindahan IKN, mobilitas dan urbanisasi akan meningkat, memicu berbagai tantangan. Kita, khususnya masyarakat adat dan para pemuda pemudi, harus bersiap. Mengingat IKN datang dengan banyak tantangan sekaligus peluang, kita tidak boleh hanya fokus pada tantangan, tetapi juga harus siap memanfaatkan peluang,” tutur Teras. (*)



Anggota DPD RI Agustin Teras Narang
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



Pembangunan Kaltim Harus Sinkron dengan IKN

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Mahyudin, menekankan bahwa pembangunan di Kalimantan Timur (Kaltim) harus komprehensif dan sejalan dengan perkembangan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang terletak di wilayah tersebut.

“Saat ini, Kota Balikpapan sudah mengalami kepadatan lalu lintas yang signifikan karena banyaknya pendatang baru. Kondisi ini diperkirakan akan semakin parah dengan diperkirakannya migrasi besar-besaran sekitar 4 juta orang ke IKN,” ujar Mahyudin dalam acara buka puasa bersama dengan tokoh

masyarakat Kaltim di Paser, Kamis (4/4/2024).

Menurut Mahyudin, kemandirian di Balikpapan menunjukkan kebutuhan mendesak untuk pembangunan yang terintegrasi dengan dinamika IKN. “Tanpa persiapan yang matang dalam infrastruktur dan transportasi publik, pembangunan di daerah penyangga IKN akan terasa tidak seimbang dengan perkembangan IKN itu sendiri,” tambahnya.

Mahyudin juga menyuarakan kebutuhan mendesak untuk membangun jalan tol yang menghubungkan kota-kota dan kabupaten di Kaltim, dari Sangata hingga Samarinda. Di Paser, ia menyarankan pembangunan jembatan atau terowongan bawah laut yang menghubungkan Balikpapan dengan Penajam, mengingat transportasi kapal ferry saat ini sudah tidak efektif lagi.

Selain itu, Mahyudin menyuarakan perlunya industrialisasi di Kaltim dengan membangun kawasan industri dari Maloy Batota hingga Paser.

“Kaltim harus mulai mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan, yang saat ini sudah menyumbang 55 persen dari PDRB Kaltim. Masa depan tambang batu bara di sini diperkirakan hanya akan bertahan 10 hingga 15 tahun lagi,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya pengolahan sumber daya alam lokal, seperti sawit, untuk meningkatkan nilai tambah produk seperti minyak goreng, sabun, dan margarin yang dapat diolah langsung di Kaltim, sehingga memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi wilayah tersebut.

Mahyudin juga menyatakan bahwa pembangunan harus mencakup peningkatan sumber daya manusia. “Data menunjukkan bahwa hanya kurang dari satu persen penduduk Kaltim yang memiliki pendidikan tingkat S2 atau S3. Kita perlu meningkatkan kualifikasi pendidikan untuk memastikan bahwa SDM lokal dapat bersaing,” tegasnya. (*)



Wakil Ketua DPD RI Mahyudin
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Banyak Karya Seniman di Bali Belum Dilindungi



Anggota DPD RI Made Mangku Pastika saat mengunjungi Sanggar Bona Alit. (Foto Antara)

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Made Mangku Pastika, mengajak para ahli hukum di Provinsi Bali untuk membantu melindungi hak cipta para seniman setempat. Menurutnya, banyak karya seniman Bali yang tak terlindungi dan rentan disalahgunakan karena tradisi hak komunal yang kuat.

“Karya seni di Bali seringkali anonim, terikat pada hak komunal, sehingga sulit bagi seniman untuk mengklaim kepemilikan atas ciptaannya. Banyak seniman di sini merasa bangga jika karyanya ditiru, namun masalah muncul ketika karya tersebut diklaim oleh orang lain dan dijual sebagai hak cipta mereka sendiri,” ujar Pastika saat mengunjungi Sanggar Bona Alit di Kabupaten Gianyar, Rabu (10/4/2024).

Pastika menegaskan bahwa tindakan seperti ini tidak boleh terus terjadi. Menurutnya, seniman Bali sering kali tidak paham tentang perlindungan hukum atas karya intelektual mereka dan merasa cukup puas hanya dengan proses berkarya dan apresiasi publik.

“Ini tidak boleh lagi terjadi. Seniman tidak boleh dibiarkan berjuang sendirian dalam ketidaktahuan,” kata Pastika.

Seniman dan pendiri Sanggar Bona Alit, I Gusti Ngurah Adi Putra (Agung Alit), mengungkapkan bahwa banyak karya yang telah ia ciptakan kini diklaim oleh pihak lain, membuatnya kesulitan menggunakan karyanya sendiri ketika hendak pentas di India. “Banyak karya kami yang diklaim oleh banyak orang, dan kami berharap ini bisa dikembalikan kepada yang berhak,” ujar

Agung Alit.

Agung Alit juga berinovasi dalam seni musik tradisional dengan menciptakan alat musik dan nada-nada baru, sehingga gamelan bisa diadaptasi dengan musik tradisi dan modern. Dia mengingatkan generasi muda Bali untuk tidak hanya mewarisi seni, tetapi juga berinovasi agar karya mereka memiliki daya saing global.

Selain berkontribusi pada seni, Agung Alit dan sanggarnya juga aktif dalam kegiatan sosial, seperti terapi musik untuk pasien di Rumah Sakit Jiwa di Kabupaten Bangli, Semarang, dan DKI Jakarta. “Kami berharap kegiatan sosial ini bisa dilanjutkan oleh seniman lain, agar dapat mengimbangi antara kebutuhan materi dan pengabdian sosial,” katanya. (*)



Pilkades Langsung Berbiaya Mahal



Anggota DPD RI Ajiep Padindang dalam kegiatan FGD di Makassar. (Foto Rakyat Sulsel.com)

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Sulawesi Selatan Ajiep Padindang, mengusulkan perubahan dalam sistem pemilihan kepala desa (pilkades) di Indonesia. Menurutnya, pemilihan langsung oleh warga harus dihentikan karena biaya politik yang sangat tinggi.

“Dalam forum ini, saya ingin menyampaikan niat saya untuk memperjuangkan perubahan metode pemilihan kepala desa, yang saat ini terlalu mahal bagi calon,” kata Ajiep dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Politik Berbudaya Menyongsong Pilkada Serentak 2024” di Makassar, Senin (8/4/2024).

Ajiep menekankan bahwa biaya yang tinggi dalam pilkades mendorong calon kepala desa untuk mengembalikan “modal” politik yang telah mereka keluarkan, yang bisa merugikan kepentingan publik.

“Biaya untuk menjadi kepala desa bisa mencapai ratusan juta rupiah, yang tentunya berdampak pada tindakan mereka setelah terpilih. Maka dari itu, saya akan memanfaatkan sisa masa jabatan saya di DPD RI untuk mengadvokasi pemilihan kepala desa yang tidak langsung,” janjinya.

Ajiep juga mengkritik pelaksanaan Pemilu 2024, yang menurutnya telah menyimpang dari nilai-nilai budaya lokal. “Contohnya, banyak warga yang sudah menerima uang dari beberapa pihak tetapi masih berpura-pura belum menerima apa-apa. Nilai seperti sipakatau,



Anggota DPD RI Muhammad Nuh dalam FGD soal pemilu di Medan. (Foto Kbanews.com)

sipakalebbi, dan sipakainge tampaknya sudah mulai hilang dalam praktik demokrasi kita,” jelasnya.

Selain itu, Ajiep menyoroti bahwa kaderisasi partai politik belum berhasil meningkatkan kualitas demokrasi. Banyak calon anggota legislatif yang belum matang dalam berpolitik dan lebih mengandalkan kekuatan uang.

Sementara itu, Muhammad Nuh, anggota DPD RI dari Sumatera Utara, juga mengungkapkan kekhawatirannya tentang pelaksanaan pemilu serentak. “Pileg dan pilpres yang dilakukan bersamaan telah menimbulkan berbagai masalah serius,” katanya dalam FGD di Medan.

Nuh menyampaikan data yang mencemaskan tentang kesehatan petugas pemilu, dengan 57 petugas meninggal dan 8.381 sakit selama Pemilu 2024, mirip dengan kejadian pada Pemilu 2019. Atas dasar itu, ia mengusulkan pemisahan waktu antara pileg dan pilpres untuk mengurangi beban dan risiko bagi petugas pemilu. (*)

Senator Apresiasi Kemenag, Lulusan Pesantren Bisa Daftar CPNS

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Hilmy Muhammad, memberikan apresiasi terhadap kebijakan pemerintah yang melibatkan Kementerian Agama dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Kebijakan ini memungkinkan lulusan pondok pesantren, khususnya dari jenjang Ma'had Aly, untuk berpartisipasi dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024.

“Ini merupakan kabar gembira dan sesuai dengan amanat UU Pesantren Tahun 2019. Peluang ini tentunya sangat berharga bagi lulusan pesantren. Kami sangat mengapresiasi kebijakan ini dan

berharap para alumni dapat memanfaatkannya dengan baik,” ujar Hilmy pada Rabu (3/4/2024).

Gus Hilmy, sapaan akrabnya, juga menyarankan agar Ma'had Aly dan Kemenag mempertimbangkan untuk tidak hanya fokus pada pendidikan keagamaan, tetapi juga membekali para mahasiswa dengan pengetahuan umum, kemampuan berbahasa asing non-Arab, dan keterampilan dalam teknologi informasi (IT).

“Di era saat ini, kemampuan IT sangat diperlukan, mengingat lulusan Ma'had Aly diharapkan dapat memasuki berbagai bidang profesi, termasuk menjadi aparatur sipil negara (ASN). Mahasiswa juga harus dibekali dengan wawasan umum untuk

menambah kesiapan mereka dalam menghadapi persaingan,” jelasnya.

Gus Hilmy menekankan pentingnya penguasaan keterampilan dasar seperti IT untuk menghindari kegagalan di tahapan seleksi yang menggunakan sistem komputer atau *Computer Assisted Test (CAT)*. “Tantangan dalam persaingan ini adalah kemampuan mahasiswa dalam menguasai perangkat yang mendukung mereka. Seperti dalam balapan sepeda, penting untuk bisa mengendarai sepeda itu sendiri. Jangan sampai kita gagal di hal-hal teknis yang seharusnya bisa dikuasai,” tambahnya.

Selain itu, dia berharap bahwa lulusan Ma'had Aly tidak hanya terbatas pada peran sebagai penyuluh agama tetapi juga memiliki peluang untuk menjadi dosen dan peneliti di perguruan tinggi, khususnya mereka yang telah menyelesaikan pendidikan S2.

Kebijakan ini berawal dari kesepakatan antara Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, yang secara khusus memberikan kesempatan kepada lulusan pondok pesantren untuk mengikuti seleksi CPNS dalam formasi penyuluh agama di bawah Kementerian Agama. (*)



Anggota DPD RI Hilmy Muhammad
(Foto/dok pribadi)

RPJPN 2025-2045 Harus Mampu Tumbuhkan Ekonomi di Luar Jawa



Wakil Ketua Komite IV DPD RI Elviana menyerahkan laporan kinerja Komisi IV kepada Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, dalam Sidang Paripurna Ke-10 di Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (5/4/2024). (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Wakil Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Elviana, menekankan pentingnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045 dalam mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa. Dalam Sidang Paripurna Ke-10 di Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (5/4/2024), Elviana menyatakan bahwa pengembangan ini harus dilakukan melalui peningkatan investasi pada infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih.



Foto Ilustrasi ist

Senator dari Jambi ini juga mengungkapkan perlunya peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar RP-JPN dapat diimplementasikan dengan efektif di daerah. Elviana menyerukan kebijakan fiskal yang sinergis untuk memastikan bahwa alokasi Transfer ke Daerah (TKD) setidaknya seimbang dengan belanja pemerintah pusat, serta memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengelola TKD, terutama untuk daerah penghasil sumber daya alam.

Dalam bidang pendidikan, Komite IV DPD RI mendorong pemerintah untuk memperpanjang durasi wajib belajar menjadi 15

tahun setingkat diploma vokasi III. Program ini diharapkan didukung oleh anggaran pendidikan gratis bagi siswa dan mahasiswa, serta peningkatan kesejahteraan untuk guru dan dosen. Evaluasi penggunaan anggaran pendidikan yang mencapai 20% juga direkomendasikan untuk fokus pada inisiatif ini.

Mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Elviana meminta pemerintah untuk memastikan bahwa dukungan anggaran yang diberikan ke UMKM melalui berbagai kementerian dan lembaga benar-benar efektif untuk pemberdayaan dan percepatan pertumbuhan UMKM. Elviana juga menekankan

perlunya perubahan paradigma UMKM di Indonesia dari sekedar bertahan hidup menjadi bagian dari industri yang terintegrasi dengan rantai pasok global.

Terakhir, Elviana mendesak pemerintah untuk memberikan prioritas pada kemudahan akses permodalan bagi UMKM, melalui keterlibatan lebih besar dari lembaga penjamin kredit seperti Jamkrindo, Jamkrida, dan Askrindo, untuk memastikan UMKM yang layak tetapi tidak *bankable* dapat memperoleh dukungan finansial. Dengan langkah ini, diharapkan UMKM dapat berkembang, memperluas jangkauan pasar, dan bersaing di pasar global. (*)



Catatan Komite I DPD RI Atas Pelaksanaan Pemilu 2024



Wakil Ketua Komite I DPD RI Filep Wamafma menyerahkan laporan pelaksanaan tugas Komite I DPD RI. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Wakil Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Filep Wamafma, menyoroti berbagai permasalahan yang muncul selama pelaksanaan Pemilu Serentak 2024, termasuk pada masa kampanye, masa tenang, pemungutan suara, serta masalah pada Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dalam Sidang Paripurna ke-10 DPD RI Masa Sidang IV Tahun Sidang 2023-2024, yang diadakan di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (5/4/2024), Filep menyampaikan kebutuhan mendesak akan revisi dan evaluasi terhadap UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Ditemukan penggunaan sumber daya negara untuk kepentingan politik, pelanggaran kampanye dan masa tenang, serta pelanggaran netralitas oleh aparatur sipil negara (ASN), TNI/Polri, dan penyelenggara pemilu. Juga masih maraknya

praktik politik uang dalam setiap tahapan pemilu,” tegasnya dalam Sidang Paripurna tersebut.

Menurut senator asal Provinsi Papua Barat ini, terdapat juga isu teknis seperti masalah keamanan pada aplikasi Sirekap, kesalahan dalam konversi foto dokumen hasil perhitungan suara, dan masalah aksesibilitas. Oleh karena itu, dirinya menekankan perlunya revisi atas Undang-Undang Pemilu serta evaluasi komprehensif terhadap penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 untuk memastikan pemilu yang adil dan jujur, sesuai dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia (luber), dan jujur serta adil (jurdil).

Filep juga melaporkan tentang keterlibatan Komite I DPD RI dalam penyusunan dan pembahasan RUU tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ), yang telah disahkan menjadi undang-undang. Selain itu, komite tersebut juga terlibat

dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta pembahasan tripartit 27 RUU tentang Kabupaten dan Kota di Komisi II DPR RI.

Lebih lanjut, dalam rangka pengawasan, Komite I DPD RI aktif mengawasi tahapan persiapan Pilkada Serentak Tahun 2024, melakukan inventarisasi materi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan inventarisasi materi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan. Ini menunjukkan komitmen DPD RI untuk ikut serta dalam mengawasi pelaksanaan pemilu dan bersinergi dengan KPU Daerah, Bawaslu Daerah, dan para penegak hukum demi tercapainya pemilu yang efektif, jujur, dan adil. (*)

Kenaikan Harga Pangan Bisa Naikkan Angka Kemiskinan

Kenaikan harga beberapa komoditas pangan strategis di Indonesia, seperti beras, daging ayam ras, telur ayam ras, dan minyak goreng curah telah menjadi perhatian utama. Data dari Badan Pangan Nasional menunjukkan bahwa harga beras per 1 Maret 2024 telah melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).

Hal ini dikemukakan oleh Wakil Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Bustami Zainudin, dalam rapat kerja dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait pada Selasa (2/4/2024).

Bustami Zainudin menjelaskan, kenaikan harga ini memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap ekonomi dan meningkatkan kemiskinan. Bagi konsumen, kenaikan harga berpotensi meningkatkan inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat. Sementara itu, bagi produsen seperti peternak ayam, kenaikan harga tidak selalu berarti peningkatan keuntungan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, menyebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi produksi pangan, termasuk penurunan produksi pupuk dan kondisi iklim ekstrim. Meskipun demikian, dia menyatakan bahwa ketersediaan 12 pangan pokok nasional dari Januari hingga Desember 2024 masih tercukupi. Namun,



Pimpinan dan anggota Komite II DPD RI menyaksikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menandatangani kesimpulan rapat. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

beberapa komoditas seperti beras, jagung, kedelai, bawang putih, daging sapi/kerbau, dan gula pasir berpotensi diimpor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Pemerintah berusaha mencari solusi untuk mengatasi kenaikan harga pangan. Upaya ini meliputi peningkatan alokasi pupuk, optimalisasi penggunaan lahan, dan percepatan mekanisasi pertanian. Pemerintah juga berencana untuk memperluas lahan pertanian di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, dengan target penambahan sekitar 1 juta hektar lahan untuk produksi pangan.

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, mengungkapkan langkah-langkah yang diambil Kementerian Perdagangan untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok, terutama menjelang Idulfitri 1445H. Peme-

rintah melakukan intervensi pasar untuk memastikan pasokan bahan pokok tetap stabil.

Sementara itu, Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional, Sarwo Edhy, menjamin bahwa neraca pangan nasional dari Januari hingga April 2024 dalam kondisi stabil dan aman. Berbagai program telah dilaksanakan, termasuk penyaluran beras SPHP, gerakan pangan murah, dan koordinasi stabilisasi pangan selama Hari Kebangkitan Nasional Bersama (HKBN) dengan kementerian/ lembaga terkait.

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Khrisnamurti, menjelaskan bahwa Bulog memiliki stok beras sebanyak 1,1 juta ton yang tersebar di seluruh Indonesia. Langkah ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga beras di pasar, yang akan diperkuat dengan pembelian beras dari produksi dalam negeri. (*)



BULD DPD RI: Rekonstruksi Legislasi Tata Kelola Ketahanan Pangan

Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI menyoroti perlunya rekonstruksi legislasi dan peningkatan tata kelola ketahanan pangan. Wakil Ketua BULD DPD RI, Lily Amelia Salurapa, menyampaikan rekomendasi ini dalam konteks perubahan yang diakibatkan oleh UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang memodifikasi UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Dalam Sidang Paripurna ke-10 di Gedung Nusantara V, DPD RI, Jakarta, pada hari Jumat (5/4/2024), Salurapa menekankan pentingnya pemerintah daerah dalam mengelola ketersediaan pangan dengan indikator yang diatur melalui peraturan daerah. Dirinya juga mendorong adopsi kebijakan pangan yang mengedepankan pendekatan kewilayahan melalui mekanisme *bottom-up*, yang bertujuan



Wakil Ketua BULD DPD RI Lily Amelia Salurapa
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

untuk mengoptimalkan sektor pertanian dan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam tata kelola multi level.

Sidang ini juga mendengarkan laporan dari Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI terkait permasalahan masyarakat Desa Celukan Bawang, Kabupaten Buleleng, Bali dengan PT. PLN (Persero) terkait pembangunan

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Wakil Ketua BAP DPD RI Evi Apita Maya, mengungkapkan bahwa telah tercapai enam poin komitmen yang harus direalisasikan oleh para pihak paling lambat enam bulan setelah penandatanganan pada tanggal 23 November 2023.

Sidang tersebut juga menetapkan bahwa BAP DPD RI akan melakukan tindak lanjut terkait pembangunan PLTU tahap II dan melakukan tinjauan lapangan untuk memantau realisasi komitmen tersebut. Keseluruhan komunitas di Provinsi Bali juga didorong untuk secara aktif

memantau proses realisasi kesepakatan tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, sidang juga mendengarkan laporan dari Komite III DPD RI terkait penyusunan RUU Perubahan atas UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang saat ini berada pada tahap inventarisasi materi. Rekomendasi dan laporan dari BULD dan BAP ini diharapkan membawa perbaikan signifikan dalam pengelolaan dan legislasi yang berkaitan dengan ketahanan pangan serta isu-isu lokal lainnya, sejalan dengan fungsi dan kewenangan konstitusional DPD RI. (*)



Wakil Ketua BAP DPD RI Evi Apita Maya
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Petugas Haji Jangan Sekedar Jalan-jalan

Komite III DPD RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji (AMPHURI) dan Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia (APJI) pada Selasa (26/3/2024). Pertemuan ini berfokus pada inventarisasi materi pengawasan atas pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.

Wakil Ketua Komite III DPD RI Abdul Hakim, menekankan pentingnya penyelenggaraan ibadah haji yang aman, nyaman, dan tertib, sesuai dengan ketentuan syariat. “DPD RI, sebagai perwakilan masyarakat dan daerah, sangat berkepentingan agar penyelenggaraan ibadah haji berlangsung dengan tanggung jawab yang diemban oleh negara,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komite III DPD RI Muslim M. Yatim, mengungkapkan harapannya akan adanya peningkatan dalam pelayanan haji. “Kami berharap penyelenggaraan haji tahun ini dapat lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, terutama dalam melayani kebutuhan jemaah yang bervariasi, termasuk lansia dan mereka yang telah lama menunggu,”



Pimpinan dan anggota Komite III DPD RI bersama pengurus AMPHURI dan APJI. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

tambahnya.

Habib Said Abdurrahman, anggota Komite III DPD RI, menyoroti peran petugas haji dalam memberikan layanan. Menurutnya, sering kali petugas tidak memberikan pelayanan maksimal kepada jemaah. “Kita sering menemukan petugas yang kurang proaktif dalam membantu jemaah, padahal mereka seharusnya lebih berperan dalam memberikan layanan bukan pergi jalan-jalan saja,” kata Habib.

Sekretaris Jenderal AMPHURI Farid Aljawi, menyampaikan beberapa catatan penting terkait penyelenggaraan haji. *Pertama*, Farid mengkritik kebijakan yang mengizinkan jemaah lanjut usia tanpa pendamping, yang menurutnya bisa menimbulkan kesulitan bagi mereka. *Kedua*, Farid menekankan pentingnya ke-

tentuan yang jelas mengenai kondisi kesehatan jemaah, yang sering kali menjadi penghalang bagi mereka yang telah lama menantikan kesempatan untuk berhaji.

Selain itu, Farid juga menyoroti perlunya memperpendek waktu tunggu bagi calon jemaah haji Indonesia, yang saat ini bisa mencapai puluhan tahun. “Kami meminta pemerintah untuk mengajukan peningkatan kuota jemaah haji Indonesia dari 221 ribu menjadi 241 ribu per tahun, untuk mengakomodir lebih banyak jemaah dalam waktu yang lebih singkat,” ujarnya.

Dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan dan penanganan isu-isu kritis yang disampaikan, diharapkan ibadah haji tahun ini dapat berlangsung lebih lancar dan memuaskan bagi semua jemaah haji Indonesia. (*)

Penting, Zonasi Usaha Dorong Pemberdayaan UMKM di Daerah



Komite IV DPD RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, pada 2 April 2024, untuk membahas kondisi terkini dan kinerja sektor UMKM. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Komite IV DPD RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, (2/4/2024), untuk membahas kondisi terkini dan kinerja sektor UMKM. Wakil Ketua Komite IV DPD RI Elviana, dalam sambutannya, menekankan pentingnya memberdayakan UMKM sebagai komponen utama dalam ekonomi nasional yang seimbang dan berkeadilan. Elviana mengungkapkan bahwa pemberdayaan UMKM harus di-

lakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan dengan pengembangan iklim bisnis yang kondusif dan dukungan penuh kepada para pelaku usaha.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, memaparkan bahwa sektor UMKM masih menunjukkan ekspansivitas di hampir semua bisnis, meski mengalami perlambatan. Indeks Ekspektasi Bisnis menunjukkan peningkatan, begitu juga dengan kepercayaan UMKM terhadap peme-

rintah. Teten juga mengidentifikasi isu-isu strategis seperti keterbatasan akses permodalan, pemasaran, dan kenaikan harga bahan baku. Teten menambahkan bahwa hingga 2023, terdapat penyaluran KUR yang signifikan dan digitalisasi UMKM telah mencakup 25,42 juta pelaku.

Senator dari Sulawesi Tenggara Amirul Tamim, menyoroti masalah modal yang sering menjadi penghambat bagi UMKM, mendorong banyak pelaku



Suasana rapat kerja Komite IV DPD RI dengan jajaran Kementerian Koperasi dan UKM di Gedung DPD RI, 2 April 2024. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

UMKM terjerat dalam pinjaman *online*. Amirul juga menekankan pentingnya memperhatikan UMKM di daerah tujuan wisata, yang sering terkendala oleh biaya transportasi mahal yang mengurangi kunjungan wisatawan.

Novita Anakotta, Wakil Ketua Komite IV DPD RI, menanyakan upaya Kemenkop UKM dalam menciptakan satu juta wirausaha baru dan kriteria UMKM untuk mendapatkan program prioritas. Novita mengungkapkan tantangan distribusi produk UMKM dari Maluku ke luar provinsi akibat biaya distribusi yang tinggi,

memerlukan kolaborasi dan sinergi lintas kementerian.

Senator Aceh, Sudirman, menyarankan pembuatan zonasi usaha untuk mengarahkan UMKM beroperasi sesuai dengan potensi dan kultur daerah masing-masing. Sudirman menekankan perlunya sosialisasi dan pelatihan intensif untuk UMKM dari Kemenkop UKM.

Ahmad Sukisman Azmy, Senator dari NTB, menyoroti rendahnya kualitas SDM pelaku UMKM yang umumnya berpendidikan rendah dan mempengaruhi standar produk yang dihasilkan. Ini menunjukkan perlunya peningkatan keterampilan dan literasi

UMKM untuk menghadapi tantangan pemberdayaan.

Jimly Asshiddiqie dari Dapil DKJ memfokuskan pada implementasi ekonomi koperasi, menyoroti bahwa praktik ekonomi koperasi belum sepenuhnya terealisasi. Jimly menekankan perlunya memperkuat kelembagaan koperasi sebagai paradigma ekonomi ke depan. Di akhir rapat, Komite IV DPD RI dan Kemenkop UKM sepakat untuk meningkatkan sosialisasi dan implementasi program-program yang mendukung pemberdayaan UMKM di daerah, menjamin kegiatan ini mendapat perhatian yang maksimal. (*)

Jelang Idulfitri 2024

KORPRI Setjen DPD RI Bagikan Bingkisan



Sekjen DPD RI Rahman Hadi menyerahkan bingkisan kepada pegawai Setjen DPD RI yang purna tugas. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Menjelang Hari Raya Idulfitri 1445 H, Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI membagikan bingkisan berupa bahan kebutuhan pokok kepada seluruh aparatur sipil Negara (ASN) dan staf pendukung di lingkungan Setjen DPD RI, Senin (1/4/2024).

Ketua KORPRI Setjen

DPD RI Oni Choiruddin menyebutkan, KORPRI Setjen DPD RI juga memberikan penghargaan kepada ASN Setjen DPD RI yang telah purna tugas. Selain itu, KOPRI Setjen DPD RI juga memberikan bantuan kepada pegawai DPD RI M Syaifullah Al Amin yang mengalami musibah kebakaran.

“Kegiatan ini merupakan salah satu program

KORPRI sebagai upaya peningkatan kesejahteraan anggota yang bekerja sama dengan dengan Dharma Wanita Persatuan Setjen DPD RI. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat memberikan keringanan di tengah kenaikan harga bahan pokok yang terjadi saat ini,” kata Oni.

Sekjen DPD RI Rahman Hadi mengapresiasi kegiatan yang dilakukan KORPRI



Ketua KORPRI Setjen DPD RI/Deputi Bidang Persidangan Setjen DPD RI Oni Choiruddin menyerahkan bingkisan lebaran kepada ASN Setjen DPD RI. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

itu. Kegiatan yang rutin dilakukan setiap tahunnya itu dinilai dapat mempererat tali persaudaraan antar ASN dan staf pendukung di lingkungan Setjen DPD RI, terutama antarsesama anggota KORPRI.

“Momen ini tepat untuk menunjukkan rasa dan kepedulian sesama anggota KORPRI melalui pemberian bingkisan yang sangat membantu, khususnya menjelang Idulfitri. Saya mengapresiasi KORPRI yang telah mengi-

nisasi dalam memberikan tali asih kepada ASN purna tugas sebagai penghargaan dan ucapan terima kasih selama mengabdikan dan berjasa di Setjen DPD RI,” ucap Rahman Hadi.

Rahman Hadi juga berpesan kepada seluruh ASN di Setjen DPD RI untuk terus memberikan pelayanan dan kontribusi bagi masyarakat dan negara sesuai dengan semangat pembentukan KORPRI. Tidak hanya kepada ASN yang masih aktif

bekerja, Rahman Hadi juga berharap agar ASN Setjen DPD RI yang telah purna tugas juga dapat terus memberikan kontribusi kepada masyarakat.

“Selamat memasuki purna tugas, semoga selalu diberikan kesehatan. Purna tugas tidak berarti berhenti kontribusi, namun tetap dapat memberi nilai dan manfaat bagi masyarakat, negara, dan lingkungan sosial di tempat kita berada,” pesannya. (*)

SKM Layanan Publik DPD RI Alami Peningkatan Signifikan

Layanan publik yang dikelola oleh Bagian Humas dan Fasilitasi Pengaduan, Biro Protokol, Humas dan Media, Sekretariat Jenderal DPD RI menunjukkan peningkatan yang signifikan pada periode tahun 2023.

Berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2023, layanan tersebut mencatat skor 86,92, yang berada dalam kategori “baik”. Skor ini meningkat hampir tiga poin dari tahun sebelumnya, yang tercatat sebesar 84,34.

Kepala Biro PHM Setjen DPD RI Mahyu Darma, menyatakan bahwa penilaian ini diperoleh langsung dari kuisisioner yang diisi oleh pengunjung yang datang menyampaikan permasalahan mereka ke DPD RI. Kuisisioner ini dibuat



Kepala Biro Protokol, Humas, dan Media Mahyu Darma
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



sesuai standar survei yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) RI.

Dari survey itu, untuk hasil SKM terkait layanan penerimaan kunjungan/delegasi tahun 2023 tercatat 86,19 dengan kategori baik. Sementara hasil SKM terkait layanan informasi publik tahun 2023 tercatat 87,64 juga dalam kategori baik.

“Alhamdulillah, tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penerimaan kunjungan delegasi dan layanan informasi yang diberikan cukup baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” ujar Mahyu kepada Majalah Senator, pertengahan April ini.

Pengunjung dalam bentuk perorangan, kelompok maupun delegasi yang datang ke DPD RI berasal dari berbagai elemen masyarakat dan lembaga, baik untuk menyampaikan pengaduan, melakukan kunjungan studi, atau diundang dalam rangka dengar pendapat atau rapat kerja dengan jajaran DPD RI.

Untuk mereka yang menyampaikan pengaduan atau permintaan konsultasi, layanan publik DPD RI akan menyalur-

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Layanan Publik di Bagian Humas dan Fasilitas Pengaduan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

Pada tahun 2023 hasil SKM menunjukkan bahwa rata-rata nilai SKM mengalami peningkatan dari tahun 2022 yaitu sebesar 84,34 menjadi 86,92 pada tahun 2023 dengan kategori BAIK.



HASIL SKM TERKAIT LAYANAN PENERIMAAN KUNJUNGAN/ DELEGASI TAHUN 2023 **86,19** BAIK

HASIL SKM TERKAIT LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

87,64 BAIK



RATA-RATA NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT TAHUN 2023

86,92 BAIK



kan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Misalnya, masalah sengketa lahan kebun atau pertanian akan disalurkan ke Badan Akuntan Publik (BAP). Konsultasi mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) atau Peraturan Daerah (Perda) akan disalurkan ke Badan Urusan Legislasi

Daerah (BULD), dan untuk kunjungan studi akan dilayani oleh pejabat terkait. Sementara itu, bila pengaduan berasal dari perorangan atau kelompok dari suatu daerah, mereka akan diarahkan untuk bertemu dengan anggota DPD RI yang berasal dari daerah yang sama. (*)



Wakil Ketua Komite IV DPD RI Elviana dan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki memperlihatkan kesimpulan rapat kerja antara kedua institusi tersebut, Selasa (2/4/2024). Rapat kerja itu membahas kondisi terkini UMKM serta kinerja Kementerian Koperasi UKM.
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Komite I DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Aceh dalam rangka pengawasan dan mendapatkan berbagai informasi serta penjelasan dari berbagai stakeholders terkait persiapan Pilkada 2024 di provinsi tersebut, Senin (1/4/2024).
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



Sekjen DPD RI Rahman Hadi bersama jajaran pejabat di lingkungan Setjen DPD RI membagikan bingkisan Lebaran 2024 kepada seluruh aparatur sipil Negara (ASN) dan staf pendukung di lingkungan Setjen DPD RI, Senin (1/4/2024).
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



Meninjau Kembali Manfaat Pramuka: Dilema Penghapusan Ekstrakurikuler Wajib

Oleh:

MOH.YUSUF, SH

Kegiatan Kepramukaan mungkin tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia yang telah lekat dengan dunia pendidikan. Akhir-akhir ini, dalam *trending topic* di *platform X* saat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengesahkan Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2024. Salah satunya menghapus kegiatan Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah. Pramuka akan menjadi kegiatan opsional yang dipilih oleh murid.

Keputusan tersebut menjadi sorotan dari banyak pihak. Dailami Firdaus Anggota DPD RI dari Daerah Khusus Jakarta (DKJ) mengkritik bahwa pendidikan kepramukaan penting untuk membentuk karakter siswa didik. Sebab, Pramuka memiliki esensi pendidikan karakter yang melibatkan aspek-aspek mental, fisik, dan sosial, dan melalui kegiatan Pramuka, para siswa juga dapat belajar tentang nilai-nilai moral, disiplin, kerja sama, tanggung jawab, hingga kepemimpinan. Selain itu, Anggota DPD RI dari DKJ Fahira Idris meminta Nadiem menjelaskan langsung ke publik mengenai keputusannya mencabut Praja Muda Karana (Pramuka) sebagai kegiatan ekstrakurikuler (ekskul) wajib bagi murid. Perubahan tersebut harus melalui konsultasi publik



atau didiskusikan terlebih dahulu dengan para pemangku kepentingan, terutama organisasi Pramuka dan satuan pendidikan.

Kepramukaan

Pada tahun 1906, Ernest Thompson Seton mengirim bukunya berjudul *The Birchbark Roll of the Woodcraft Indians* kepada Baden-Powell. Seton sering mengadakan pertemuan dengan Baden Powell dan menyusun rencana untuk gerakan pemuda kemudian Robert Stephenson Smyth Baden Powell merintis. Pada tahun 1907, mengorganisir sebuah kamp di Pulau Brownsea Island di lepas pantai Dorset, Inggris, mempraktikkan dengan mengumpulkan 22 anak laki-laki dan mengajak mereka berkemah. Itulah awal mula Gerakan Pramuka yang kini jadi agenda di berbagai sekolah. Kegiatan perkemahan ini sukses besar dan menjadi tonggak sejarah lahirnya

gerakan kepanduan. Pada 1907 Powell merangkum dan menulis pengalamannya saat bertugas di Afrika dan India dalam sebuah buku berjudul *Scouting for Boys* yang diterbitkan pada tahun 1908 dan menjadi pedoman menyebar di seluruh dunia dan diterjemahkan ke berbagai bahasa di seluruh dunia. Atas jasanya bagi perkembangan Pramuka, tanggal kelahiran Baden Powell, yakni 22 Februari, dijadikan Hari Pramuka/Keperanduan sedunia.

Di Indonesia, tonggak kepramukaan ditandai dengan berdirinya *Nationale Padvindere Organisatie* (NPO) oleh Dr. Soetomo pada tanggal 20 Mei 1923 di Yogyakarta, dilatarbelakangi pada masa penjajahan Belanda organisasi kepanduan hanya diperuntukkan bagi orang Belanda dan elite pribumi. Sehingga Dr. Soetomo melihat kepanduan sebagai wadah yang tepat untuk membina generasi muda Indonesia agar memiliki jiwa nasionalisme dan kemandirian. Pada tahun 1938, berbagai organisasi kepanduan di Indonesia dipersatukan dalam satu organisasi *Persatuan Pandu Indonesia* (PPI) dan dibubarkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1940 karena pemerintah Belanda khawatir PPI akan menjadi kekuatan yang membahayakan kolonialisme Belanda. Setelah Indone-



sia merdeka pada tahun 1945, Pramuka terus berkembang. Sri Sultan Hamengkubuwono IX, merupakan Raja Yogyakarta ke-9 dan sekaligus pencetus nama “Pramuka”, dan menjadi Bapak Pramuka Indonesia yang kemudian pada tanggal 5 April 1961, Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 112 Tahun 1961.

Pramuka dan Kurikulum Pendidikan

Pramuka menjadi kegiatan ekstrakurikuler wajib di sekolah tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 043/U/1967 tentang Pramuka sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib di Sekolah. Keputusan ini mulai berlaku pada tahun ajaran 1967/1968. Pada tanggal 11 Juli 2014, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah diundangkan.

Permendikbud No. 63 Tahun 2014 merupakan bukti nyata komitmen pemerintah terhadap pengembangan kepramukaan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah menyadari pentingnya kepramukaan dalam membina generasi muda Indonesia. Yang diganti dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2022 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Kepra-

mukaan. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2022 diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan kepramukaan di Indonesia. Hal ini penting untuk membina generasi muda Indonesia yang berkarakter dan siap membangun bangsa.

Pada Tahun 2024, Mendikbudristek Nadiem Makarim mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 12 Tahun 2024 menghapus Kepramukaan dalam Kurikulum Pendidikan, alasan penghapusan kewajiban Pramuka bertujuan untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi siswa untuk mengembangkan minat dan bakat mereka. Dengan demikian, siswa diharapkan dapat memilih kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan hasrat mereka. Selain itu, Kemendikbudristek juga ingin memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah dalam mengembangkan kurikulumnya. Sekolah dapat memilih kegiatan ekstrakurikuler yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswanya. Keputusan tersebut menuai banyak kritik dan penolakan, antara lain:

1. Melanggar UU No. 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka mengamanatkan bahwa Pramuka merupakan kegiatan wajib bagi peserta didik.

2. Melemahkan peran Pramuka dalam membentuk karakter generasi muda Indonesia dan pembinaan generasi muda.

3. Membatasi kesempatan peserta didik dalam manfaat antara membentuk karakter, mengembangkan kepemimpinan,

an, meningkatkan keterampilan, memperkuat persatuan dan kesatuan.

4. Kurangnya sosialisasi dan konsultasi dimana keputusan penghapusan Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib diambil harus dengan sosialisasi dan konsultasi yang luas kepada berbagai pihak, termasuk,

5. Ada kekhawatiran dan penolakan dari berbagai pihak, antara lain Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, organisasi-organisasi kepemudaan, pakar pendidikan, guru, orang tua, dan peserta didik.

Kesimpulan

1. Penghapusan kewajiban Pramuka di sekolah merupakan sebuah perubahan yang perlu disikapi dengan bijak. Di satu sisi, kita perlu memberikan ruang yang lebih luas bagi siswa untuk mengembangkan minat dan bakat mereka. Di sisi lain, kita juga perlu memastikan bahwa nilai-nilai karakter dan nasionalisme tetap ditanamkan kepada siswa.

2. Pramuka tetaplah kegiatan yang penting dan bermanfaat bagi siswa. Oleh karena itu, penting bagi sekolah untuk tetap menyediakan Pramuka sebagai ekstrakurikuler bagi siswa. Dengan demikian, siswa yang memiliki minat dan bakat di bidang Pramuka tetap dapat mengembangkan potensinya secara maksimal.

*(*Penulis adalah Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislasi Ahli Muda Unit Pusat Kajian Daerah dan Anggaran Setjen DPD RI)*



1 Ketupat:

Ketupat adalah hidangan wajib Lebaran, terbuat dari beras yang dibungkus dalam anyaman daun kelapa dan dimasak hingga matang. Ketupat sering disajikan dengan opor ayam, rendang, atau gado-gado, menciptakan kombinasi yang lezat dan menggugah selera.

Made from rice packed inside woven palm leaves, ketupat is a highly anticipated dish during Eid. Ketupat is usually served with various side dishes such as chicken opor, rendang, or others, creating a delicious and appetizing combination.



Foto Liputan6.com

Empat Kuliner Paling Dinanti saat Lebaran

Four Most Anticipated Culinary Delights During Eid

Selama perayaan Lebaran di Indonesia, beberapa hidangan khas sangat populer dan banyak dicari, di antaranya:

During the celebration of Eid al-Fitr in Indonesia, several traditional dishes are extremely popular and highly sought after, including:

2 Opor Ayam:

Opor ayam adalah semacam kari yang terbuat dari ayam yang dimasak dalam kuah santan kental berbumbu kunyit, jahe, dan bawang. Hidangan ini biasanya disajikan bersama ketupat atau lontong, menjadikannya menu favorit selama Lebaran.



Foto Blibli.com

Opor Ayam is a type of curry made from chicken cooked in a thick coconut milk broth seasoned with turmeric, ginger, and onions. This dish is typically served with ketupat or lontong—a compressed rice cakes, making it a favorite during Eid.

3 Rendang:

Rendang adalah hidangan daging yang kaya rasa dari Minangkabau, Sumatera Barat. Daging sapi, kerbau, atau kadang-kadang daging ayam dimasak dengan rempah-rempah dan santan selama beberapa jam hingga cairan mengering dan daging menjadi sangat empuk. Rendang adalah simbol dari masakan Minangkabau dan sangat populer di seluruh Indonesia saat Lebaran.



Foto Liputan6.com

Rendang is a richly flavored meat dish from the Minangkabau region of West Sumatra. Beef, buffalo meat, or sometimes chicken is slowly cooked with spices and coconut milk for several hours until the liquids evaporate and the meat becomes very tender. Rendang is a symbol of Minangkabau cuisine and is extremely popular throughout Indonesia during Eid.

4 Sambal Goreng Ati

Hidangan ini biasanya terdiri dari potongan hati sapi atau ayam yang dimasak dengan kentang, cabe, dan rempah-rempah dalam santan. Sambal goreng ati sering menjadi bagian dari menu Lebaran, disajikan bersama ketupat dan opor ayam.

This dish usually consists of beef or chicken liver cooked with potatoes, chili, and spices in coconut milk. Sambal Goreng Ati is often served alongside ketupat and opor ayam as part of the Eid menu.



Foto DetikFood.com

Keempat hidangan ini tidak hanya lezat tapi juga kaya akan tradisi, dan setiap tahunnya menjadi bagian penting dari perayaan Lebaran di Indonesia.

These four dishes are not only delicious but also rich in tradition, and they play an important part in the Eid celebrations in Indonesia every year.



**PIMPINAN & ANGGOTA DPD RI
BESERTA SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI**

Mengucapkan

Selamat Hari Kartini

"Habis Gelap, Terbitlah Terang"

-Raden Ajeng Kartini-

21 April 2024



MEDIA PUBLIKASI DIGITAL DPD RI

